



**Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Periode s.d. Triwulan III Tahun 2021

Banjarmasin, Okt 2021

Ikhtisar Capaian Kinerja dan Risiko s.d. Triwulan I Tahun 2021



KINERJA		T	R	Indeks Cap	RISIKO	P21	Q3
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
SASARAN STRATEGIS : Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien							
6b-CP	Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	96.65	108,6	RE #15	Terdapat pagu minus pada level enam digit belanja satker K/L	13 8
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SASARAN STRATEGIS : Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan publik atas layanan DJPb	4.64	4,66	100,4	RE #10	Terjadinya pemadaman listrik (yang disengaja maupun tidak)	13 11
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE							
SASARAN STRATEGIS : Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi							
2a-N	Indeks kepuasan publik atas layanan DJPb	4.64	4,66	100,4	RE#22	Terdapat potensi ancaman pegawai terpapar virus Covid-19	16 16
SASARAN STRATEGIS : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel							
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	30%	103,28	344,26	RE#23	Terdapat potensi banjir di Gedung Kantor	15 10
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SASARAN STRATEGIS : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu							
7a-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	79	N/A		RE#16	Penyampaian Laporan LKPD Pemda dikirimkan mendekati batas waktu penyampaian laporan GFS	12 12
					RE#17	Data analisis laporan keuangan pemerintah daerah tidak diperoleh secara lengkap	12 9

Peta Risiko Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2021



Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti terjadi	7	6 12 5	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9 6	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	4 8	13 4 3	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	11 3	16 1	21
	1	Hampir Tidak terjadi	1	5	10 2	15 2	20

No	Highlight Risk Event	P21	Q3
1	RE#22 Terdapat potensi ancaman pegawai terpapar virus Covid-19	16	16
2	RE#23 Terdapat potensi banjir di Gedung Kantor	15	10
3	RE#10 Terjadinya pemadaman listrik (yang disengaja maupun tidak)	13	11
4	RE#5 Terdapat pagu minus pada level enam digit belanja satker K/L	13	8
5	RE#16 Penyampaian Laporan LKPD yang diterima mendekati batas waktu pengiriman laporan GFS	12	12
5	RE#17 Data analisis laporan keuangan pemerintah daerah tidak diperoleh secara lengkap	12	9

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Tren Besaran Risiko Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2021



Prioritas	Nomor RE	Risk Event (RE)	P21	Q2
	SO #8	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi		
1	RE #22	Terdapat potensi ancaman pegawai terpapar virus Covid-19	16	16
	SO #9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel		
2	RE #23	Terdapat potensi banjir di Gedung Kantor	15	10
	SO #2	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien		
3	RE #10	Terjadinya pemadaman listrik (yang disengaja maupun tidak)	13	11
	SO #1	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien		
4	R #5	Terdapat pagu minus pada level enam digit belanja satker K/L	13	8
	SO #7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel transparan dan tepat waktu		
5	RE #16	Penyampaian Laporan LKPD Pemda dikirimkan mendekati batas waktu penyampaian laporan GFS	12	12
	SO #7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel transparan dan tepat waktu		
6	RE#17	Data analisis laporan keuangan pemerintah daerah tidak diperoleh secara lengkap	12	9

Lampiran Risiko

Periode s.d. Triwulan III Tahun 2021

1

Sasaran : Organisasi dan SDM yang Optimal dan berkinerja tinggi

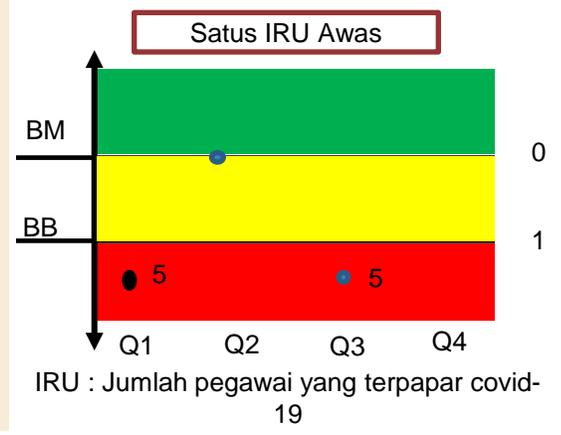
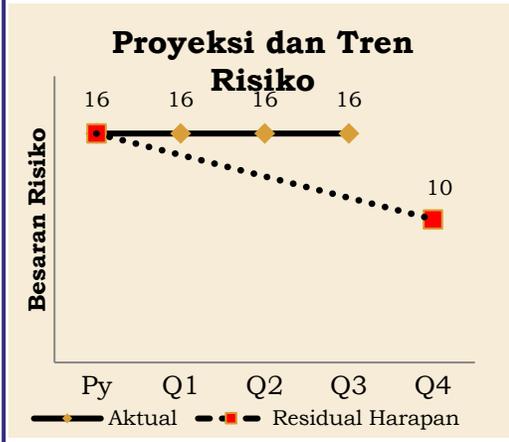
Risiko : Terdapat potensi ancaman pegawai terpapar Covid-19, karena pandemic covid-19 belum berakhir, Protokol kesehatan terkait pelaksanaan WFH, larangan melakukan perjalanan baik domestik/internasional, dan social distancing belum dipedomani secara baik. Hal tersebut berakibat gangguan kesehatan pada pegawai dan penurunan kinerja.

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada triwulan III, Risiko masih pada **level tinggi (besaran risiko 16)**, dengan pertimbangan pada Tw III terdapat 5 pegawai yang terpapar covid-19, meskipun pegawai telah divaksin tahap II tidak ada jaminan pegawai tidak bisa terpapar. Banjarmasin diberlakukan PPKM level IV karena jumlah penderita Covid-19 dan penyebaran virus masih tinggi dengan adanya varian baru. level dampak tetap pada level signifikan (4)

Proyeksi Risiko

proyeksi besaran risiko turun pada triwulan IV yaitu risiko sedang (15) dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah melaksanakan vaksin, penanganan covid efektif, berkurangnya jumlah penderita covid-19 dan menurunnya level PPKM, akan tetapi tetap waspada. Sehingga proyeksi level risiko pada TW IV menurun menjadi sedang (15) satu waspada



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Penyediaan sarana dan prasarana : tempat cuci tangan, disinfektan, sabun , pemberian vitamin dll
2. Penyemprotan ruangan dan lingkungan sebanyak dua kali seminggu
3. Test antigen kepada pegawai yang pernah berinteraksi denga pegawai yang terpapar covid
4. Vaksinasi Tahap I dan II Kepada semua pegawai yang lolos scrining Kesehatan
5. Monitoring pegawai yang melakukan perjalanan keluar kota dan penambahan pegawai yang melaksanakan WFH
6. Pemberian vitamin (penambah daya tahan tubuh) 7. Webinar tentang Kesehatan (Covid-19) 8. Larangan pegawai cuti/mudik 9. Larangan Pegawai melakukan cuti yang beriringan/terdapat libur nasional 10 Kebijakan WFH bagi pegawai kembali dari cuti/ WfHb dari luar kota

Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
------------------	------------------	-------------------

1. Penyemprotan ruangan dan lingkungan seminggu dua kali
2. Himbauan mematuhi protokol Kesehatan pada setiap kesempatan

2

Sasaran : Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel

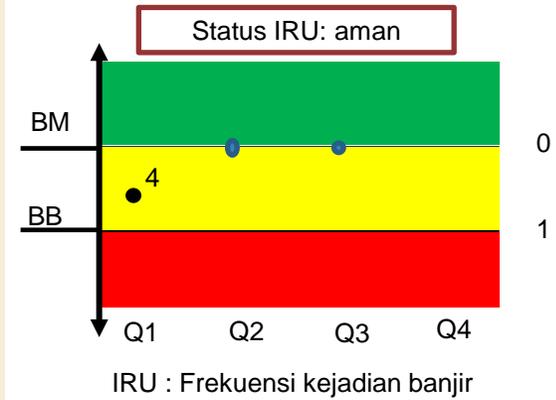
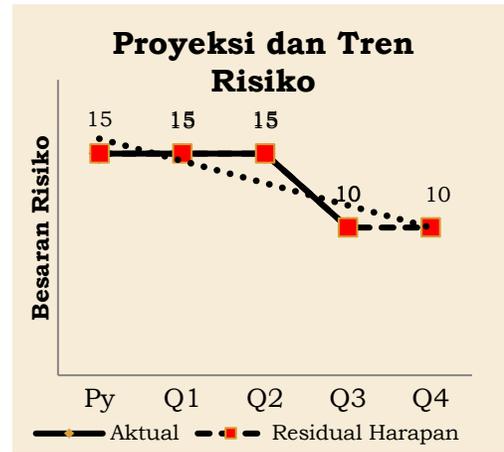
Risiko : Terdapat potensi banjir di gedung kantor akibat curah hujan yang tinggi, terjadinya air pasang dan posisi lantai I yang lebih rendah serta terjadinya rembesan air melalui celah-celah lantai hal tersebut mengakibatkan gangguan layanan organisasi dan penurunan kinerja.

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada triwulan III, Risiko turun pada **level rendah (besaran risiko 10)**, dengan pertimbangan mitigasi pemeliharaan berupa penggantian keramik telah selesai dilaksanakan. Selama Tw III tidak terjadi air masuk ke Lt 1. Level dampak pada level aman

Proyeksi Risiko

proyeksi besaran risiko tetap rendah pada triwulan karena mitigasi resiko pemeliharaan lantai I berupa pengantian lantai sudah selesai dilakukan, meskipun curah hujan masih tinggi. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2021 level resiko tetap 10 (rendah) . Status IRU aman



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Pengadaan pompa air untuk mempercepat proses penyedotan apabila air masuk ke Gedung kantor
2. Memastikan petugas jaga kantor siap siaga 24
3. Memindahkan alat-alat listrik/elektronik ke tempat yang aman (lebih tinggi)
4. Memindahkan arsip ke tempat yang lebih aman dari ancaman banjir
5. Proses penggantian keramik pada lantai I
6. Perbaiki drainase depan kantor
7. Penambahan Penyekatan dinding aula (ruang FO)

Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1. Pemeliharaan rutin	Bagian Umum	Triwulan IV

3

Sasaran : Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien

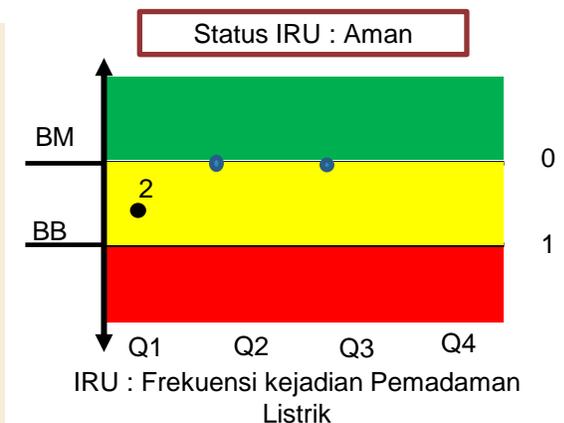
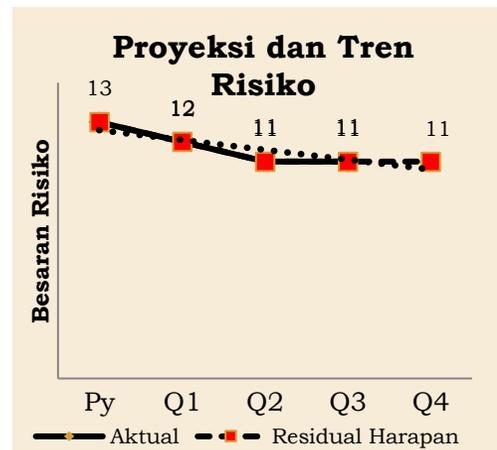
Risiko : Terdapat pemadaman listrik (yang disengaja maupun tidak, karena suplay listrik dari PLN kurang memadai, kerusakan genset serta adanya kerusakan gardu atau jaringan kabel listrik akibat petir atau musibah lainnya. Hal tersebut berakibat gangguan terhadap layanan organisasi.

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada triwulan III, Risiko tetap pada **level rendah (besaran risiko 11)**, dengan pertimbangan dalam pada akhir triwulan II telah dilakukan penggantian genset yang baru dengan kapasitas 100 KVA. Sebelum ada penggantian (Genset lama) telah dilakukan pemeliharaan dengan baik dan tidak ada kendala saat listrik PLN. Status IRU pada level aman karena tidak terdapat potensi peningkatan risiko

Proyeksi Risiko

proyeksi besaran risiko tetap pada level rendah pada triwulan IV karena telah dilakukan penggantian genset dan pemeliharaan secara rutin tetap dilaksanakan.. Status IRU Aman



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Pemeliharaan/service secara rutin sebanyak dua kali dalam satu triwulan
2. Mengusulkan ke kantor pusat pengadaan genset yang baru
3. Penggantian oli mesin genset
4. Membuat Kartu pemeliharaan genset lama
5. Membuat Kartu Pemeliharaan genset baru
6. Penggantian genset

Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1. Pemeliharaan genset secara rutin (ganti oli, persediaan bahan bakar yang cukup)	Bagian Umum	Triwulan IV Oktober
2. Membuat Kartu pemeliharaan genset yang baru TW IV		

4

Sasaran : Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

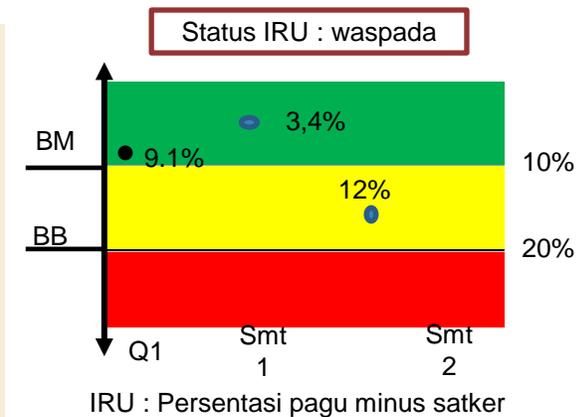
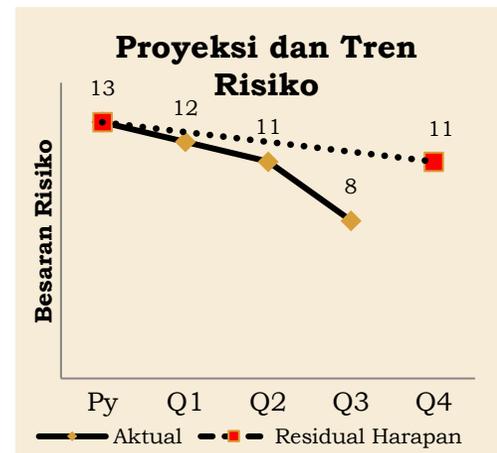
Risiko : Terjadinya pagu minus pada level enam digit belanja satker kementerian/Lembaga akibat perencanaan anggaran satker yang buruk, kurangnya alokasi dana untuk membiayai belanja pegawai dan tidak dilakukannya pemuthkhiran data DIPA akibat perubahan POK satker yang berakibat pada menurunnya nilai presentase kinerja pelaksanaan anggaran L/K .

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada triwulan III, Risiko tetap pada **level rendah (besaran risiko 8)**, dengan pertimbangan meskipun pagu dana pegawai tidak mencukupi gaji pegawai tetap masih bisa dibayarkan. Level dampak minor sedangkan level kemungkinan pada kadang terjadi Pada TW III Sebanyak 68 satker mengalami pagu belanja pegawai yang minus (12%). Status IRU waspada

Proyeksi Risiko

proyeksi besaran risiko turun pada triwulan IV pada level 9 tetap rendah dengan level kemungkinan sering terjadi sedangkan level dampak tetap pada level minor karena pagu belanja pegawai telah dilakukan revisi oleh satker . Status IRU aman



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Melakukan sosialisasi tentang tata cara revisi tahun anggaran 2021
2. Monitoring pagu minus
3. Koordinasi dengan satker

Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring secara intensif 2. Koordinasi dengan satker yang mempunyai pagu minus melalui media telp, SMS, WA 3. Mengirimkan surat kepada satker untuk segera melakukan revisi atas pagu minus 	Bidang PA I	Triwulan IV. Triwulan IV

5

Sasaran : Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

Risiko : Penyampaian Laporan LKPD yang diterima mendekati batas waktu pengiriman GFS, sehingga Laporan GFS bisa terlambat. Pemda menyampaikan laporan mendekati batas waktu, akibat kurang optimalnya koordinasi pihak kanwil dengan pemda dan koordinator LKPD tingkat Provinsi yang menyebabkan penurunan kinerja terkait dengan nilai kualitas laporan GFS tingkat wilayah

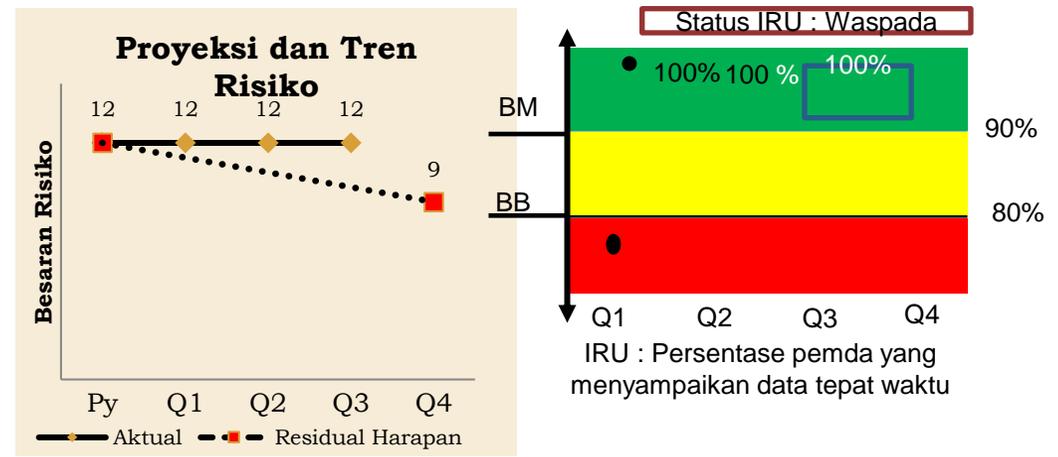
Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada triwulan III, Risiko masih pada **level sedang (besaran risiko 12)**, dengan pertimbangan: resiko ini akan tetap ada karena belum adanya sanksi yang tegas/jelas, meskipun pada triwulan III pemda dalam menyampaikan laporan 100% tepat waktu, sehingga masih perlu dilakukan mitigasi.

Level dampak tetap pada level minor (penurunan kinerja nilai kualitas GFS tingkat wilayah)

Proyeksi Risiko

Pada triwulan IV tahun 2021, Risiko ini diharapkan turun pada level rendah sehubungan dengan telah dilaksanakan mitigasi risiko secara optimal.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Laporan Monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan GFS dari Pemda
2. Koordinasi secara intensif dengan pihak pemda on the spot pada Pemprop Kalsel, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, HST, Tapin pada bulan April 2021
3. Menyampaikan Surat No S-100/WPB.19/2021 tgl 1 Februari 2021 hal Permohonan data LKPD Preliminary TA 2020
4. Menyampaikan Surat No S-418/WPB.19/2021 tgl 14 April 2021 hal Permohonan data LKPD TW I 2021
5. Sharing session dengan Pemda Februari 2021, FGD “Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keu. Daerah dimasa pandemic 23 Juni 2021
6. Sosialisasi Pepres No 23/2020 ttg Harga Satuan Regional dan LKPD Konsolidasian tgl 27 April 2021
7. Koordinasi informal melalui telepon dan medsos terkait penyampaian LKPD
8. Untuk keperluan Penyusunan GFS Semester I Tahun 2021 dan GFS Tahun 2020 Audited akan dikirimkan surat

9. Untuk penyusunan laporan GFS 2020 Audited telah dikirimkan surat ke Pemda tgl 2 Agustus 2021 Nomor S-984/WPB.19/2021
 10. Monev Realisasi APBD tgl 23 September 2021

Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan GFS dari Pemda 2. Tetap melakukan koordinasi informal dalam rangka pengumpulan data. 3. Koordinasi/konfirmasi penyampaian data LKPD on the spot 4. FGD tentang keuangan pemerintah daerah 5. Untuk penyusunan GFS TW III akan dikirimkan surat permohonan data ke pemda 	Bidang PAPK	Triwulan IV

6

Sasaran : Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

Risiko : Data analisis laporan keuangan pemerintah daerah tidak diperoleh secara lengkap disebabkan keterbatasan akses dalam memperoleh data serta pemilik data pihak eksternal tidak kooperatif dalam menyediakan data hal ini berakibat pada penurunan kinerja terkait dengan nilai kualitas laporan GFS tingkat wilayah.

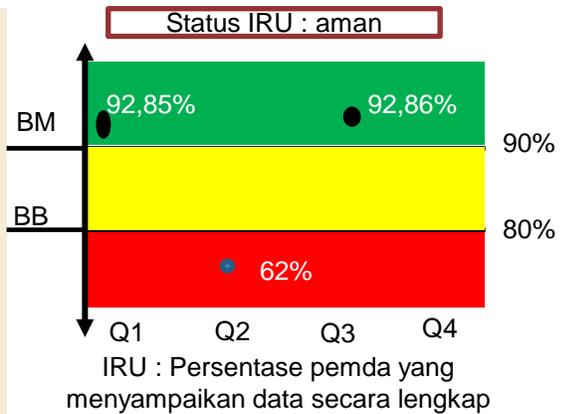
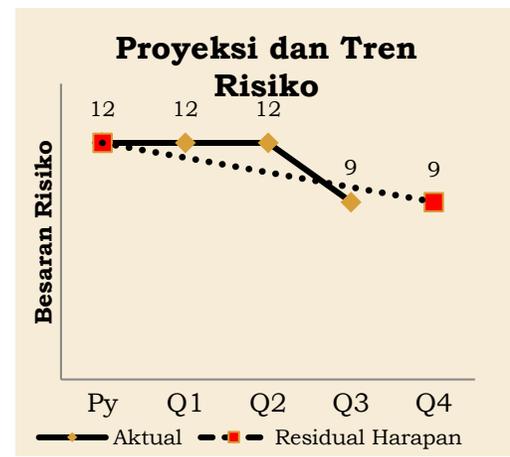
Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada triwulan III, Risiko turun pada **level rendah (besaran risiko 9)**, dengan pertimbangan: persentase pemda yang menyampaikan data secara lengkap sesuai target (100%). Hal ini diindikasikan dengan tingkat akurasi kelengkapan data 92,86%

Level dampak tetap pada level minor (penurunan kinerja nilai kualitas GFS tingkat wilayah) satu IRU pada level aman

Proyeksi Risiko

Pada tahun 2021 Triwuln IV risiko diproyeksikan tetap pada level rendah hal ini karena pelaksanaan mitigasi sudah dilaksanakan. Status IRU aman



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Laporan Monitoring dan evaluasi kelengkapan Laporan GFS dari Pemda
2. Koordinasi secara intensif dengan pihak pemda
3. Sharring session dengan BPKAD
4. Sosialisasi Pepres No 23/2020 ttg Harga Satuan Regional dan LKPD Konsolidasian tgl 27 April 2021

Rencana Mitigasi	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1. Laporan Monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan GFS dari Pemda	Bidang PAPPK	triwulan IV
2. Koordinasi secara intensif dengan pihak pemda		
3. FGD terkait dengan keuangan pemerintah daerah		

TERIMA KASIH